

ABSTRAKSI

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan amanat "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Konsepsi "dikuasai oleh negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, telah ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi¹, yang merumuskan bahwa penguasaan negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan. Dinyatakan bahwa: pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara". Permasalahan dalam tesis ini adalah Penerimaan Prinsip *Sovereignty Over Natural Resources* pada peraturan perundangan-undangan dibidang Pertambangan Mineral di Indonesia dan Pengaturan Prinsip *Sovereignty Over Natural Resources* pada Kontrak Karya Pertambangan Mineral. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian memperoleh jawaban bahwa Hukum Kanonik dan UU Perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan dalam mengatur pembatalan perkawinan, mengenai akibat hukum pembatalan pada Hukum Kanonik hanya mengatur terhadap suami isteri, sedangkan pada UU Perkawinan mengatur terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan.

Kata Kunci: Kedaulatan, Investasi, Pertambangan.

ABSTRACTION

Section 33 verse (3) ACT Laws States that to act on the law of “Earth, Water and its vast riches of nature resources which are blessed within the country are owned by the country and purely used for the prosperity of the people”. The concept “owned by the country” which are stated in the Section 33 verse (3) ACT laws, is translated by the Supreme Constitution, stating that owned by the country is defined by its ownership is of higher value than the ownership of the people. The concept owned by the country is a concept of the public law, which involves the principles of sovereignty of the people which are defined in ACT laws, which includes politics (political democracy) and even economy (economical democracy). By understanding the sovereignty of the people, the people are recognised as the source, owner and also the holds the highest ownership in a country. In the thesis, it is mentioned that there are contrasting definitions between the principles of *Sovereignty Over Natural Resources* from Mineral Mining Indonesia and Mineral Mining Contract. This research is analysed based on law abiding and its approach are based on Statue Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach. The result of this research states that acceptance of principles of *Sovereignty Over Natural Resources*, has adopted ACT laws of Republic of Indonesia and the laws of the Coal & Mineral Mining in accordance with the Mining laws of Indonesia, in the clause of the Contract of Work, the clause of Right and Obligations, the clause of taxation, and the clause accomplishment of legal action and for the benefit of national. The Contract of Work the PT. Newmont has been managed about the regulation of *Sovereignty Over Natural Resources* in every clauses, but in the clause of tax showing the imbalance and the right of discriminatory which is obtained by PT. Newmont Nusa Tenggara.

Keywords: *Sovereignty, Investation, Mining*